



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUSRI**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)**
3. NHK : **429524**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.345.000.000**

1. Tanah Seluas 2180 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 332 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 3745 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
4. Tanah Seluas 2345 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 715 m2/200 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 270.000.000
6. Tanah Seluas 2245 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah Seluas 2535 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
8. Tanah Seluas 349 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 55.000.000
9. Tanah Seluas 3600 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 117.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND LG DSL/LF82 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.



7.000.000

3. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 11.000.000

4. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 10.000.000

5. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 7.800.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.471.800.000

III. HUTANG

Rp. 51.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.420.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.